



**PENGAWASAN UPAH MINIMUM  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN  
DAERAH (STUDI IMPLEMENTASI PADA  
MAL KOTA KASABLANKA JAKARTA  
SELATAN)**

**SKRIPSI**

**ERSA HAMZAH**

**1810611178**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI  
IMPLEMENTASI PADA MAL KOTA KASABLANKA  
JAKARTA SELATAN)**

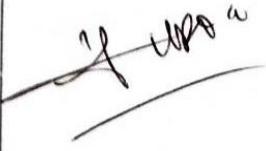
**ERSA HAMZAH**

**1810611178**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim  
Penguji

Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 5 Januari 2022

Mengetahui	Menyetujui
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum	Dosen Pembimbing Tugas Akhir
	
Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn	Dr. Taufiqurrohman Syahuri, SH., MH.
NIP. 198701022019031006	NIP. 196005020002056002.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Ersa Hamzah

NPM : 1810611178

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Judul : Pengawasan Upah Minimum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Ketua Pengaji

Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H.



Pengaji 1

Syamsul Hadi, S.H,M.H.



Pengaji 2

Dr.Taufiqurrohman

Syahuri, SH., M.H.



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 5 Januari 2022



Kaprodi

Taupiqqurrahman,  
S.H.,M.KN.

## **BIODATA PENULIS**



Nama : Ersa Hamzah

Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta/ 10 Mei 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jalan Palbatu 1 RT. 004 RW. 04,  
Menteng Dalam, Tebet, DKI Jakarta

No. Telpon : 087888776552

Email : [hamzahersa@gmail.com](mailto:hamzahersa@gmail.com)

Nama Orang Tua

a. Ayah : Slamet Mansur

b. Ibu : Heriyani

Pendidikan Formal

1. SD Negeri Tebet Barat 05 (Lulus Thn. 2011)
2. SMP Negeri 216 Jakarta (Lulus Thn. 2014)
3. SMA Negeri 3 Jakarta (Lulus Thn. 2017)

## Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Forum Anak Kelurahan Menteng Dalam (Th. 2017)
2. Anggota Forum Anak Administrasi Jakarta Selatan (Th. 2018)
3. Ketua Komisi Pemilihan Raya Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta (Th. 2020)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Ersa Hamzah

NIM : 1810611178

Tanggal : 5 Januari 2022

Tanda Tangan :



Ersa Hamzah

**Pernyataan Persetujuan Publikasi (Skripsi)**  
**Untuk Kepentingan Akademik**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ersa Hamzah  
NIM : 1810611178  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Pengawasan Upah Minimum  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23  
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  
Daerah (Studi Implementasi Pada Mal  
Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional

bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 5 Januari 2022

Yang menyatakan,



Ersa Hamzah

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul :

**“PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI IMPLEMENTASI PADA MAL KOTA KASABLANKA JAKARTA SELATAN)”**

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dorongan baik materiil ataupun spiritual dari berbagai pihak, maka Penulis tidak akan dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi, yang merupakan syarat bagi setiap Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dalam mencapai gelar Sarjana Hukum. Sehingga pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum UPNVJ yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Taufiqqurohman Syahuri S.H.,M.H. selaku pembimbing tugas akhir yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan dalam skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Wicipto Setiadi S.H.,M.H. selaku ketua penguji tugas akhir saya.
4. Bapak Slamet Tri Wahyudi S.H.,M.H selaku pembimbing akademik yang telah yang telah berkenan memberikan arahan dan nasehat.
5. Bapak Taupiqqurrahman, S.H.,M.Kn. selaku Kaprodi Sarjana Hukum yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis.
7. Ayah, Ibu, serta Adikku yang telah memberikan doa dan segalanya yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan penulis.
8. Teman-teman rumah Warung bude Eja, Maul, Septian, Dagoy, Baim, Rasyid, Daren, Idung, Alip yang telah menemani saya mengerjakan skripsi sambil bermain mobile legend karena mengerjakan skripsi butuh hiburan yaitu bermain.

9. Teman-teman kampus FH Bijak, Fadli, Axcel, Andre, Lala, Nou, Sipal, Indra, Athe, Nawang yang telah berbagi keluh kesah sampai akhir penggerjaan skripsi.
10. Teman-teman SMA Pascal, Dinda, Dilla, Prima, Allya, Fadel, Ika, Dhika yang selalu menjadi teman sampai saat ini.
11. Seluruh pihak yang ikut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam menyusun skripsi ini Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama kalangan untuk penulis, kalangan akademisi, praktisi serta seluruh masyarakat.

Jakarta, 5 Januari 2022



Ersa Hamzah

## **Abstrak**

Pembagian urusan pemerintah konkuren menjadi cita-cita dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pelaksanaan otonomi untuk daerah yang lebih luas ditujukan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Urusan pemerintah konkuren ini meliputi banyak bidang salah satunya ketenagakerjaan. Urusan ketenagakerjaan dibagi menjadi dua kamar antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Dalam mengawasi pemberian upah minimum ini Pemerintah daerah provinsi lah yang bertanggung jawab menyelenggarakannya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pengawasan pemberian upah minimum ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pekerja agar mendapatkan penghidupan yang layak. Tujuan tulisan ini memberikan penjelasan dalam hal bagaimana pembagian urusan pemerintah konkuren dalam mengawasi pemberian upah minimum DKI Jakarta dan Implementasi Pengawasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Metode penitian yang akan digunakan yakni penitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer melalui wawancara (Studi Lapangan) dan data sekunder pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Hasil penitian ini menerangkan bahwa pembagian urusan tidak sinkron dan pengawasan terhadap upah minimum belum maksimal dalam menciptakan keadilan bagi para pekerja.

Kata kunci : urusan pemerintah, urusan pemerintahan konkuren, pengawasan upah minimum.

## **Abstract**

The division of concurrent government affairs is the ideal of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in which the implementation of autonomy for the wider region is aimed at managing their own household. Concurrent government affairs cover many fields, one of which is employment. Manpower affairs are divided into two chambers between the Central Government and the Provincial Government. In supervising the provision of this minimum wage, it is the provincial government that is responsible for administering it in accordance with the mandate of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Supervision of the provision of minimum wages is intended to provide legal certainty for workers to earn a decent living. The purpose of this paper is to provide an explanation in terms of how the division of concurrent government affairs in supervising the provision of the DKI Jakarta minimum wage and the implementation of supervision that has been carried out by the Provincial Government. The research method that will be used is empirical juridical research using primary data through interviews (Field Study) and secondary data from a statutory approach (Statute Approach). The results of this study explain that the division of affairs is not synchronized and the supervision of the minimum wage has not been maximized in creating justice for workers.

**Keywords :** government affairs, concurrent government affairs, minimum wage supervision.

## **DAFTAR ISI**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
BIODATA PENULIS .....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup Penilitian .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penilitian.....	5
1. Tujuan Penilitian .....	5
2. Manfaat Penilitian.....	5
E. Metode Penilitian .....	6
1. Jenis Penilitian .....	7
2. Pendekatan Masalah.....	7
3. Sumber Data.....	8
4. Cara Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Analisis Data.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Hasil Penilitian Terdahulu .....	14
B. Tinjauan Teori.....	20
<b>BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....</b>	<b>38</b>

A. Deskripsi Hasil Temuan Pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam mengawasi pemberian upah minimum di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .....	38
B. Deskripsi Hasil Temuan Implementasi peran pemerintah sudah sesuai dalam mengawasi pemberian upah minimum di Provinsi DKI Jakarta studi Implementasi pada Mal Kota Kasablanka .....	44
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Analisa Pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam mengawasi pemberian upah minimum di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	54
B. Analisa Implementasi peran pemerintah sudah sesuai dalam mengawasi pemberian upah minimum di Provinsi DKI Jakarta studi Implementasi pada Mal Kota Kasablanka. ....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	73
DAFTAR LAMPIRAN	

## **DAFTAR TABEL**

<i>Tabel.1. Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.....</i>	43
<i>Tabel.2. Wawancara dengan Responden dari perusahaan Hokkaido Baked Cheese Tart di Mal Kota Kasablanka.....</i>	45
<i>Tabel.3. Wawancara dengan Responden dari perusahaan Yoshinoya di Mal Kota Kasablanka.....</i>	46
<i>Tabel.4. Wawancara dengan Responden dari perusahaan Daiso Japan di Mal Kota Kasablanka.....</i>	48
<i>Tabel.5. Wawancara dengan Responden dari perusahaan Miniso di Mal Kota Kasablanka.....</i>	49
<i>Tabel.6. Wawancara dengan Responden dari perusahaan Ikkudo Ichi di Mal Kota Kasablanka.....</i>	50
<i>Tabel.7. Perubahan klasifikasi urusan Pemerintahan.....</i>	55